

2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
KABUPATEN SAROLANGUN
Telp/Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun 2022 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2022. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Negeri Sarolangun telah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2022, yang meliputi bidang penanganan perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana prasarana dan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik serta pengawasan.

Maksud penyusunan Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung RI serta sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun di tahun berikutnya.

Semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan dapat menjawab kepentingan institusi dan publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Umum Tingkat Pertama	4
1. Keadaan Perkara Pidana	4
2. Keadaan Perkara Perdata	6
B. Penyelesaian Perkara	8
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	8
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	9
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK ...	11
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	12
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	13
1. Posbakum	15
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	16
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	16
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	17
A. Komposisi SDM	18
B. Mutasi	21
C. Promosi	21
D. Pensiun	21
E. Diklat	21
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI ...	25
A. Pengelolaan Keuangan	25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	28
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	31
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	36
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	36
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
C. Inovasi Pelayanan Publik	42
BAB VI PENGAWASAN	45
A. Internal	45
B. Evaluasi	47
BAB VII PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Rekomendasi	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022	4
Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022.....	6
Tabel 3. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2022.....	8
Tabel 4. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022	10
Tabel 5. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022.....	11
Tabel 6. Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Tahun 2022	12
Tabel 7. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022	13
Tabel 8. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2022	15
Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2022	16
Tabel 10. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun s.d. 31 Desember 2022	18
Tabel 11. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2022	20
Tabel 12. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2022	20
Tabel 13. Mutasi SDM Tahun 2022.....	21
Tabel 14. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022	22
Tabel 15. Realisasi Anggaran DIPA 01.....	25
Tabel 16. Rincian Belanja Pegawai.....	26
Tabel 17. Rincian Belanja Barang DIPA 01	26
Tabel 18. Rincian Belanja Modal.....	27
Tabel 19. Realisasi Anggaran DIPA 03.....	27
Tabel 20. Rincian Belanja Barang DIPA 03	27
Tabel 21. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2022.....	28
Tabel 22. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2022.....	28
Tabel 23. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2022	29
Tabel 24. Daftar BMN Yang Dihapus Tahun 2022	31
Tabel 25. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2022.....	32
Tabel 26. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2022	33
Tabel 27. Struktur PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun	41
Tabel 28. Susunan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2022	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sarolangun	14
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun	17
Gambar 3. Sosialisasi e-Berpadu Bagi Aparat Penegak Hukum Wilayah Kab. Sarolangun	35
Gambar 4. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun	42
Gambar 5. Aplikasi SIPELIK.....	42
Gambar 6. Brosur Layanan Braille	43
Gambar 7. Manual Book Dasar-Dasar Bahasa Isyarat	43
Gambar 8. Kartu Layanan Prioritas	43
Gambar 9. Layanan Informasi Digital Bantuan Hukum	44

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor : 04 Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan *financial* berada satu atap dibawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Pada era reformasi, lembaga peradilan dituntut untuk lebih transparan dan profesional di bidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan. Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan di mata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan menjadi pengayom bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan tanggung jawab lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut diatas, administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan, memiliki visi, misi, dan rencana strategis sebagai berikut :

- **Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Adapun visi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

- **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

- 🌱 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
- 🌱 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
- 🌱 Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- 🌱 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

- **Rencana Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2020-2024. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut dirangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

1. Keadaan Perkara Pidana

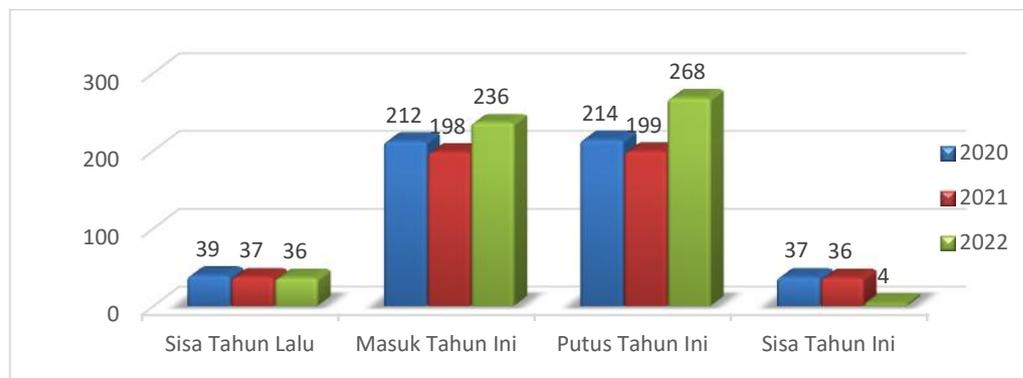
Keadaan perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
1.	Pidana Biasa	36	236	268	4
2.	Pidana Anak	-	8	8	-
3.	Pidana Cepat	-	7	7	-
4.	Pidana Singkat	-	-	-	-
5.	Lalu Lintas	-	3355	3355	-
JUMLAH		36	3606	3638	4

a. Pidana Biasa

Grafik 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada perkara yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dipersentasekan maka terjadi kenaikan sebesar 19,19% dibandingkan tahun 2021, dan sebesar 11,32% dibandingkan tahun 2020.

Demikian juga untuk penyelesaian perkara, terjadi kenaikan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dihitung persentase penyelesaian perkara Pidana Biasa untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 98,53%, 84,68% dan 85,26%.

b. Pidana Anak

Grafik 2. Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada perkara yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dipersentasekan maka terjadi kenaikan sebesar 166,67% dibandingkan tahun 2021, dan kenaikan sebesar 33,33% dibandingkan tahun 2020.

Sementara untuk penyelesaian perkara, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jika dihitung persentase penyelesaian perkara Pidana Anak untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 100%.

c. Pidana Cepat/Tipiring

Grafik 3. Keadaan Perkara Pidana Cepat Tahun 2020 - 2022

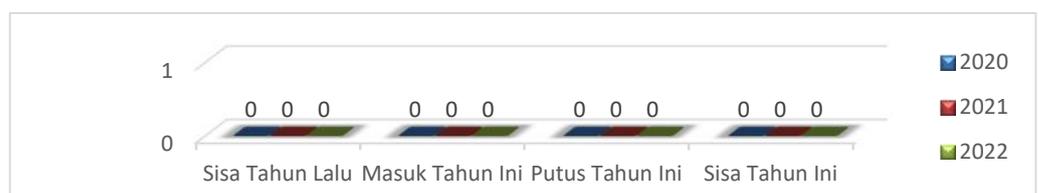


Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada perkara yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dipersentasekan maka terjadi kenaikan sebesar 700% dibandingkan tahun 2021, dan kenaikan sebesar 250% dibandingkan tahun 2020.

Sementara untuk penyelesaian perkara, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jika dihitung persentase penyelesaian perkara Pidana Cepat untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 100%.

d. Pidana Singkat

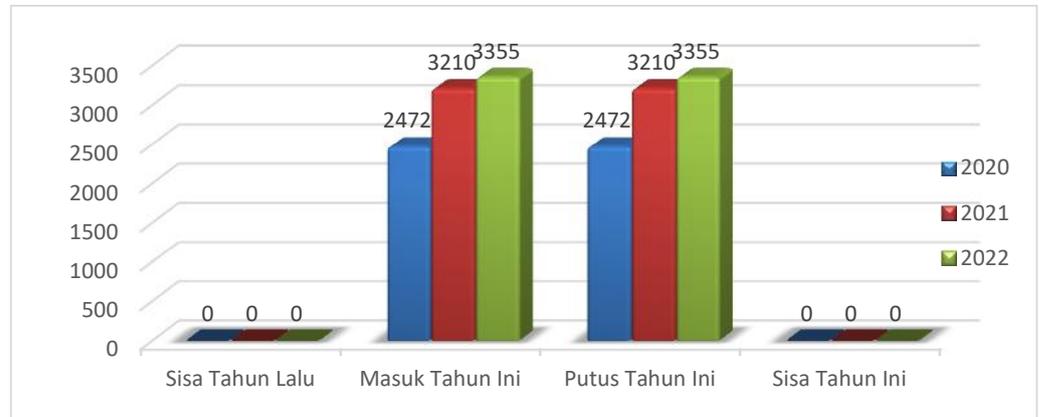
Grafik 4. Keadaan Perkara Pidana Singkat Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa tidak pernah ada perkara Pidana Singkat yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

e. Perkara Lalu Lintas

Grafik 5. Keadaan Perkara Lalu Lintas Tahun 2020 – 2022



Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada perkara yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dipersentasekan maka terjadi kenaikan sebesar 4,51% dibandingkan tahun 2021, dan kenaikan sebesar 29,85% dibandingkan tahun 2020.

Sementara untuk penyelesaian perkara, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jika dihitung persentase penyelesaian perkara Lalu Lintas untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 100%.

2. Keadaan Perkara Perdata

Keadaan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
1.	Perdata Gugatan	11	27	33	5
2.	Perdata Permohonan	-	8	8	-
3.	Gugatan Sederhana	3	10	12	1
JUMLAH		14	45	53	6

a. Perdata Gugatan

Grafik 6. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa untuk perkara yang masuk di tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 dan kenaikan dibandingkan tahun 2020. Jika dipersentasekan maka terjadi penurunan sebesar 12,90% dibandingkan tahun 2021, dan kenaikan sebesar 28,57% dibandingkan tahun 2020.

Demikian juga untuk penyelesaian perkara, terjadi kenaikan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dihitung persentase penyelesaian perkara Perdata Gugatan untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 86,84%, 68,57% dan 86,21%.

b. Perdata Permohonan

Grafik 7. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada perkara yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Jika dipersentasekan maka terjadi kenaikan sebesar 33,33% dibandingkan tahun 2021, dan sebesar 166,67% dibandingkan tahun 2020.

Sementara untuk penyelesaian perkara, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jika dihitung persentase penyelesaian perkara Perdata Permohonan untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 100%.

c. Gugatan Sederhana

Grafik 8. Keadaan Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada perkara yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dipersentasekan maka terjadi penurunan sebesar 28,57% dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2020.

Sementara untuk penyelesaian perkara, terjadi kenaikan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, dan terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dihitung persentase penyelesaian perkara Gugatan Sederhana untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 92,31%, 78,57% dan 100%.

B. Penyelesaian Perkara

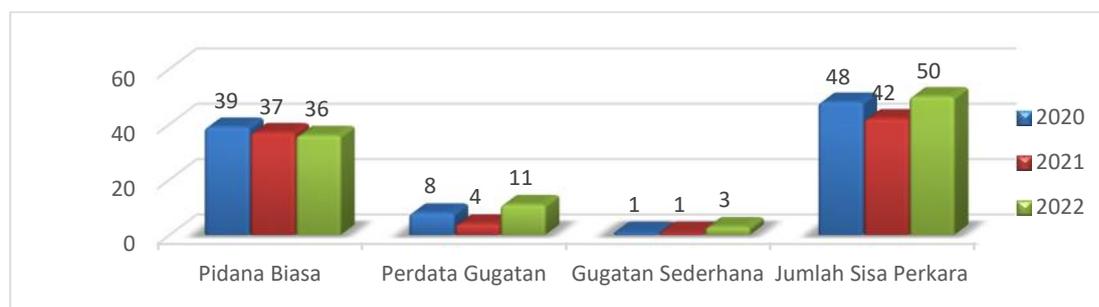
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2022

No.	Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
1.	Pidana Biasa	36	236	268	4
2.	Pidana Anak	-	8	8	-
3.	Pidana Cepat	-	7	7	-
4.	Perdata Gugatan	11	27	33	5
5.	Perdata Permohonan	-	8	8	-
6.	Gugatan Sederhana	3	10	12	1
JUMLAH		50	296	336	10

Grafik 9. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2020 - 2022



Jumlah sisa perkara tahun 2021 adalah sebanyak 50 perkara, yang terdiri dari 36 perkara Pidana Biasa, 11 perkara Perdata Gugatan dan 3 perkara Gugatan Sederhana. Semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2022. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2021 dan 2020, dapat dilihat bahwa jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 8 perkara (19,05%) dibandingkan tahun 2021 dan sebanyak 2 perkara (4,16%) dibandingkan tahun 2020.

Meskipun mengalami kenaikan, namun semua sisa perkara tersebut berhasil diselesaikan di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya di tahun 2022.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

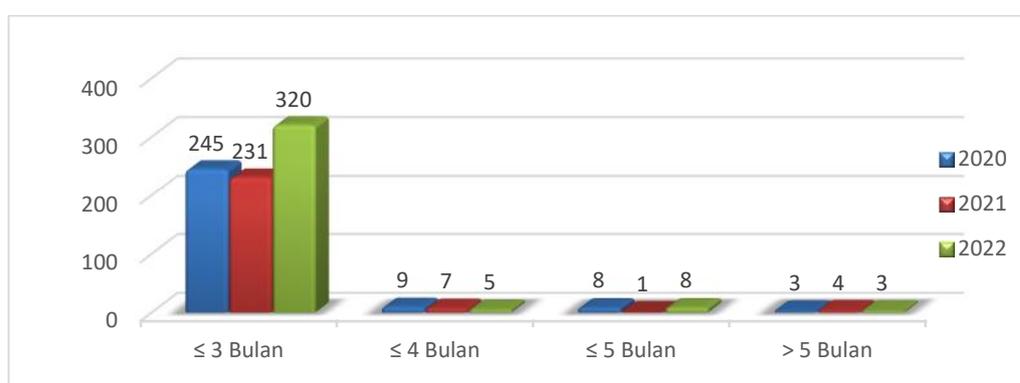
Untuk perkara Perdata Gugatan yang melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal Laporan Mediator sampai dengan tanggal minutasi. Sementara untuk perkara lainnya, termasuk Perdata Gugatan yang tidak melalui proses Mediasi, penyelesaian perkara dihitung mulai dari tanggal pendaftaran perkara sampai dengan tanggal minutasi.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022

No.	Perkara	Putus Tahun 2022	Diputus ≤ 3 Bulan	Diputus ≤ 4 Bulan	Diputus ≤ 5 Bulan	Diputus > 5 Bulan
1.	Pidana Biasa	268	268	-	-	-
2.	Pidana Anak	8	8	-	-	-
3.	Pidana Cepat	7	7	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	33	17	5	8	3
5.	Perdata Permohonan	8	8	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	12	12	-	-	-
JUMLAH		336	320	5	8	3

Grafik 10. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2020 - 2022



Dari 336 perkara yang diputus pada tahun 2022, sebanyak 333 perkara telah diselesaikan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 99,10%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, yang persentase perkaranya masing-masing 98,35% dan 98,86%, maka persentase perkara yang diputus tepat waktu di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,75% dari tahun 2021 dan 0,24% dari tahun 2020.

Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah Majelis Hakim di tahun 2022, sehingga perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun juga telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap kepatuhan penyelesaian perkara dibawah jangka waktu 5 bulan, sehingga dilakukan upaya secara maksimal untuk memutus perkara yang masuk dengan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan.

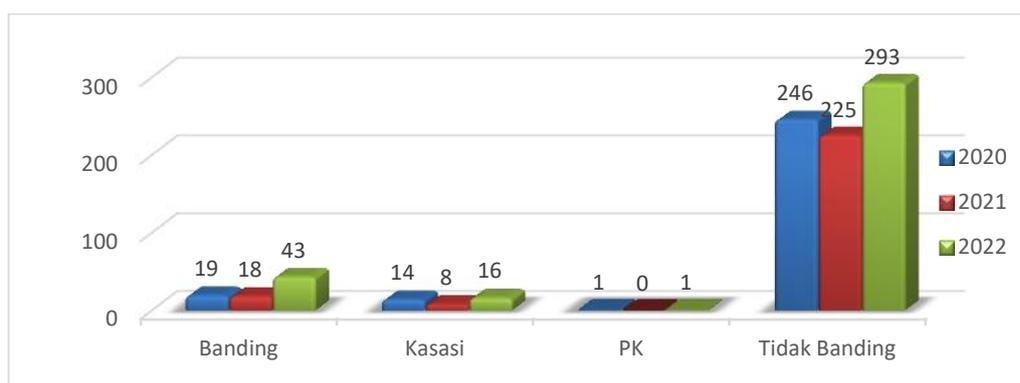
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Putus Tahun 2022	Tidak Banding	Upaya Hukum Banding	Upaya Hukum Kasasi	Upaya Hukum PK
1.	Pidana Biasa	268	241	27	9	-
2.	Pidana Anak	8	4	4	-	-
3.	Pidana Cepat/Tipiring	7	7	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	33	21	12	7	1
5.	Perdata Permohonan	8	8	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	12	12	-	-	-
JUMLAH		336	293	43	16	1

Grafik 11. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2020 – 2022



Dari 336 perkara yang putus pada tahun 2022, sebanyak 293 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 87,20%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, yang persentase perkaranya masing-masing 92,59% dan 92,83%, maka persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,39% dari tahun 2021 dan 5,73% dari tahun 2020.

Hal ini dikarenakan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah memahami hak-haknya untuk mengajukan upaya hukum.

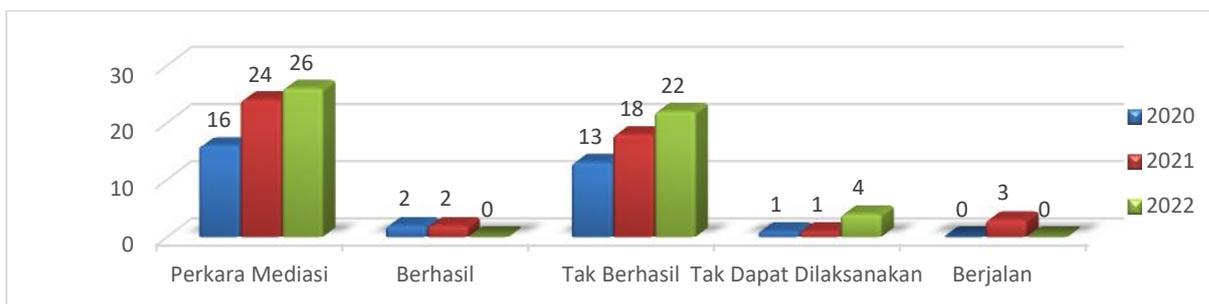
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Kedaaan perkara Perdata Gugatan yang berhasil dimediasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil	Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
Perdata Gugatan	26	-	22	4	-

Grafik 12. Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Tahun 2020 – 2022



Dari 27 perkara Perdata Gugatan yang masuk tahun 2022, terdapat 23 perkara yang dilakukan mediasi. Dan dari 11 sisa perkara tahun 2021, terdapat 3 perkara mediasi yang masih berjalan dari tahun 2021. Jika dijumlahkan maka ada 26 perkara Perdata Gugatan yang dilakukan mediasi di tahun 2022.

Dari 26 perkara tersebut, tidak ada mediasi yang berhasil dilakukan, dan sebanyak 4 perkara tidak dapat dilaksanakan proses mediasi. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 15,38%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, yang persentase perkaranya masing-masing 14,28% dan 18,75%, maka persentase jumlah perkara Perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,1% dari tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 3,37% dari tahun 2020.

Hal ini dikarenakan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun lebih memilih kepastian hukum melalui putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun.

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Kedaaan perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
Pidana Anak	8	2	2	-

Grafik 13. Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2020 - 2022



Dari 8 perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2022, terdapat 2 perkara yang dilakukan diversi. Dari 2 perkara tersebut, kedua-duanya berhasil dilakukan diversi. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, yang persentase perkara berhasil melalui diversi masing-masing 100% dan 0%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berusaha semaksimal mungkin agar perkara Pidana Anak dapat diselesaikan melalui diversi.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Untuk mewujudkan peradilan yang modern, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah berkomitmen dengan menerapkan secara ketat, sungguh-sungguh dan terukur Program Akreditasi Penjaminan Mutu. Pengadilan Negeri Sarolangun selaku salah satu Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan Program tersebut sejak tahun 2017.

Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan penghargaan yang membanggakan, yaitu Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terakreditasi A (*Excellent*), sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 61/DJU/SK/OT.01.3/4/2022 tanggal 4 April 2022.



Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan Tingkat Pertama dan sekaligus merupakan Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Sarolangun.

1. Posbakum

Pengadilan Negeri Sarolangun mendapat alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*). Dengan rincian 240 jam layanan per tahun, dan untuk setiap satu jam dibayarkan honor Advokat Piket sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*).

Pemilihan Jasa Konsultan untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung. Sementara untuk pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan per hari.

Laporan pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Pemohon (Orang)	Layanan Hukum Yang Dimohonkan
1.	Januari	2	Konsultasi perkara pidana
		-	Konsultasi perkara perdata
2.	Februari	1	Konsultasi perkara pidana
		2	Konsultasi perkara perdata
3.	Maret	2	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
4.	April	-	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
5.	Mei	1	Konsultasi perkara pidana
		2	Konsultasi perkara perdata
6.	Juni	4	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
7.	Juli	-	Konsultasi perkara pidana
		4	Konsultasi perkara perdata
8.	Agustus	2	Konsultasi perkara pidana
		2	Konsultasi perkara perdata
9.	September	2	Konsultasi perkara pidana
		1	Konsultasi perkara perdata
10.	Oktober	1	Konsultasi perkara pidana
		3	Konsultasi perkara perdata
11.	November	-	Konsultasi perkara pidana
		3	Konsultasi perkara perdata
JUMLAH		35	

Sementara untuk Laporan Realisasi Anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2022

Bulan	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
Februari	1.000.000	23.000.000
Maret	2.200.000	20.800.000
April	2.600.000	18.200.000
Mei	2.400.000	15.800.000
Juni	2.000.000	13.800.000
Juli	2.400.000	11.400.000
Agustus	2.400.000	9.000.000
September	2.400.000	6.600.000
Oktober	2.400.000	4.200.000
November	2.600.000	1.600.000
Desember	1.600.000	0

Pada akhir tahun 2022 tidak terdapat sisa anggaran untuk Posbakum, sehingga jika dipersentasekan realisasi anggaran yang terserap senilai 100%.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun tidak terdapat *zitting plaats* dan tidak ada sidang keliling. Seluruh pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pada tahun 2022 tidak ada permohonan Sidang Keliling yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Sarolangun juga tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang Keliling dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2022 tidak ada permohonan Perkara Prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Sarolangun juga tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2015 tersebut, struktur organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua.

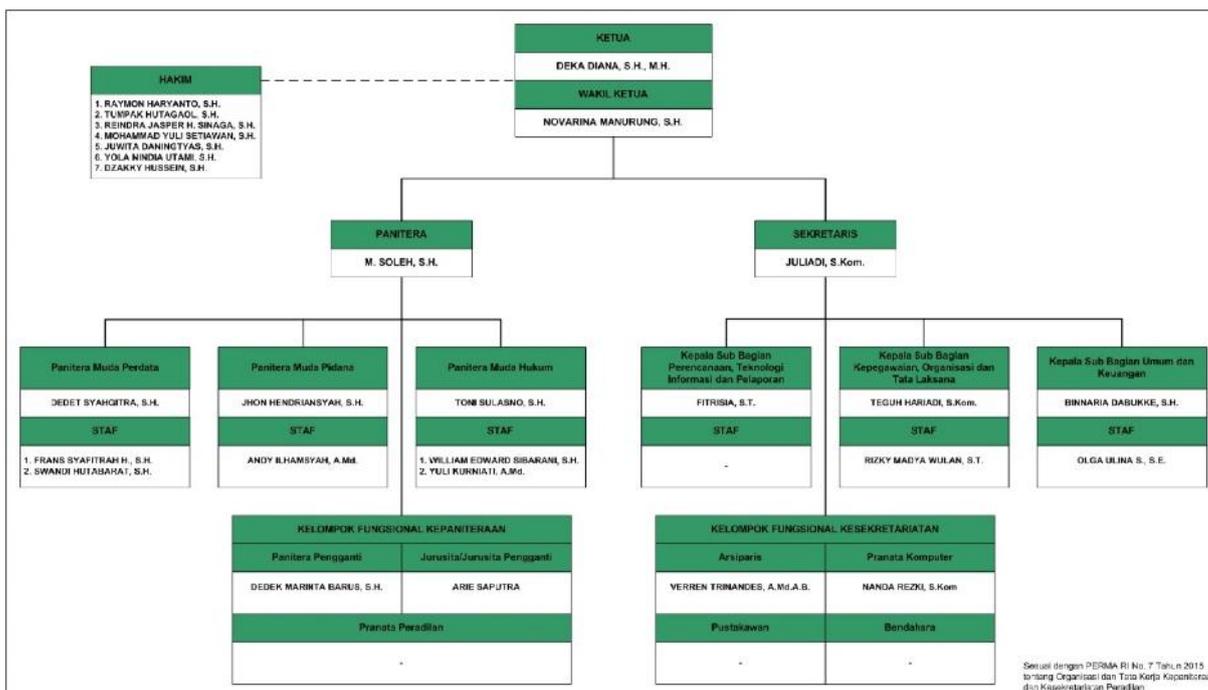
2. Kepaniteraan

Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

3. Kesekretariatan

Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural.

Pada bagian struktural terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Untuk Kelompok Fungsional Kepaniteraan terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan Pranata Peradilan. Sedangkan untuk Kelompok Fungsional Kesekretariatan terdiri dari Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, dan Bendahara.

A. Komposisi SDM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan. Jumlah SDM di Pengadilan Negeri Sarolangun sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah sebanyak 37 orang, yang terdiri dari 9 orang Hakim, 11 orang di bagian Kepaniteraan, 8 orang di bagian Kesekretariatan dan 9 orang Honorer. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun s.d. 31 Desember 2022

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
1.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Ketua	IV/a	S2
2.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Wakil Ketua	IV/a	S1
3.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	III/b	S1
4.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	III/b	S1
5.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	III/b	S1
6.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	III/b	S1
7.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Hakim	III/b	S1
8.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	III/b	S1
9.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	III/b	S1
10.	M. SOLEH, S.H.	Panitera	III/c	S1

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
11.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris	III/d	S1
12.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Panitera Muda Perdata	III/d	S1
13.	TONI SULASNO, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d	S1
14.	JHON HENDRIANSYAH, S.H.	Panitera Muda Pidana	III/c	S1
15.	TEGUH HARIADI, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	III/d	S1
16.	FITRISIA, S.T.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/c	S1
17.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/c	S1
18.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H.	Panitera Pengganti	III/c	S1
19.	NANDA REZKI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	III/a	S1
20.	ARIE SAPUTRA	Jurusita Pengganti	II/d	SMK
21.	VERREN TRINANDES, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	II/c	D3
22.	FRANS SYAFITRAH HUTARIYUS, S.H.	Staf/Analisis Hukum	III/c	S1
23.	RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E.	Staf/Analisis Tata Laksana	III/c	S2
24.	OLGA ULINA S., S.E.	Staf/Bendahara Tingkat Pertama	III/a	S1
25.	SWANDI HUTABARAT, S.H.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
26.	WILLIAM EDWARD SIBARANI, S.H.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
27.	YULI KURNIATI, A.Md.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pengelola Perkara	II/c	D3
28.	ANDY ILHAMSYAH, A.Md.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pengelola Perkara	II/c	D3
29.	KAMSI PUTRA	Honorar	-	SMA
30.	RICKI RICHARDO	Honorar	-	SMA
31.	M. RIDWAN	Honorar	-	SMA
32.	ALEX SETIAWAN	Honorar	-	SMA
33.	HUSNI MUBAROK, A.Md	Honorar	-	D3

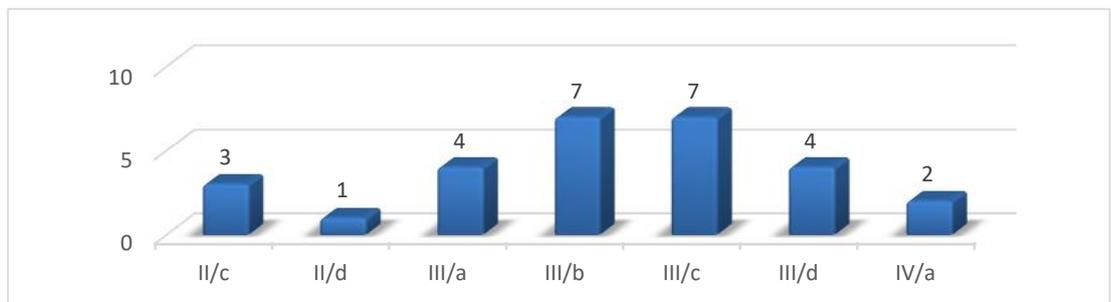
No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
34.	KAMALUDIN	Honoror	-	SMA
35.	HARFA LIANNA	Honoror	-	SMA
36.	M. ROLIB	Honoror	-	SMA
37.	SUSI MEIDIYANA	Honoror	-	SMA

Untuk pengelompokan SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2022

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina (IV/a)	2
2.	Penata Tk. I (III/d)	4
3.	Penata (III/c)	7
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
5.	Penata Muda (III/a)	4
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7.	Pengatur (II/c)	3
JUMLAH		28

Grafik 14. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2022

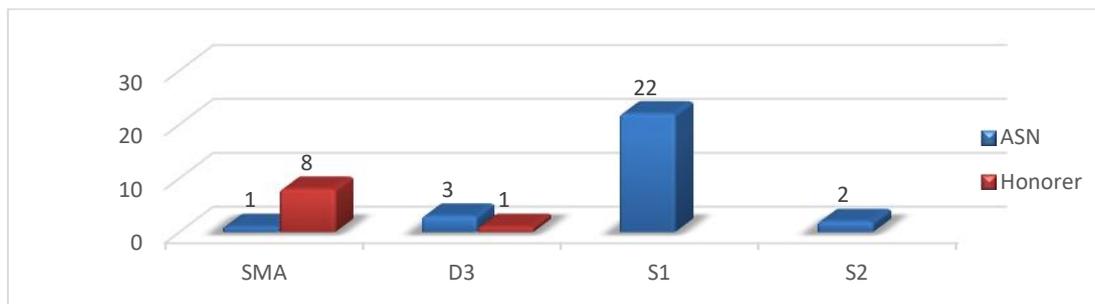


Dan untuk pengelompokan SDM berdasarkan Pendidikan Terakhir dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 12. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2022

No.	Pendidikan Terakhir	ASN	Honoror
1.	Magister (S2)	2	-
2.	Sarjana (S1)	22	-
3.	Diploma III (D3)	3	1
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	8
JUMLAH		28	9

Grafik 15. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2022



B. Mutasi

Selama tahun 2022 terdapat beberapa mutasi pegawai, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Mutasi SDM Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan/Satuan Kerja Asal	Jabatan/Satuan Kerja Tujuan
1.	ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro
2.	TONI SULASNO, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun
3.	JHON HENDRIANSYAH, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun
4.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Promosi

Tidak ada pelaksanaan promosi di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2022.

D. Pensiun

Tidak ada Hakim ataupun Aparatur Sipil Negara yang pensiun di Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2022.

E. Diklat

Pada tahun 2022 ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
1.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Pelatihan <i>Champion Meeting – Court Excellence Training</i>	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	13 – 17 Januari 2022
2.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Pelatihan <i>Champion Meeting – Court Excellence Training</i>	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	13 – 17 Januari 2022
3.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan Bagi Hakim Peradilan Umum	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	07 Februari – 11 Maret 2022
4.	NANDA REZKI, S.Kom.	Pelatihan Dasar CPNS <i>Distance Learning</i> Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d. XIV Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	14 Februari – 24 Maret 2022
5.	M. YULI SETIAWAN, S.H.	Pelatihan Berkelanjutan Bagi Hakim Tk. Pertama (CJE-1) Peradilan Umum	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	01 – 14 Maret 2022
6.	ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	15 – 17 Maret 2022
7.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	15 – 17 Maret 2022
8.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	15 – 17 Maret 2022
9.	VERREN TRINANDES, A.Md., A.B.	<i>E-Learning</i> Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IV TA 2022	Badan Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI	21 – 29 Maret 2022
10.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	21 Maret – 05 April 2022
11.	M. SOLEH, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	05 – 07 April 2022
12.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVI Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	11 – 22 April 2022, 09 – 18 Mei 2022, 22 – 31 Mei 2022

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
13.	TONI SULASNO, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	19 – 21 April 2022
14.	NANDA REZKI, S.Kom.	Pelatihan Muatan Lokal Kompetensi Teknis Bidang Tugas Bagi Peserta Latsar CPNS Golongan III	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	25 – 28 April 2022
15.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Niaga – Kepailitan Bagi Hakim Peradilan Umum	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	20 Juni – 13 Juli 2022, 17 – 23 Juli 2022
16.	SWANDI HUTABARAT, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama Dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	05 Agustus – 25 November 2022
17.	WILLIAM EDWARD SIBARANI, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama Dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	05 Agustus – 25 November 2022
18.	YULI KURNIATI, A.Md.	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama Dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	05 Agustus – 25 November 2022
19.	ANDY ILHAMSYAH, A.Md.	Pelatihan Dasar CPNS Secara <i>Blended Learning</i> Kerjasama Dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	05 Agustus – 25 November 2022
20.	M. SOLEH, S.H.	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MA RI	MA RI Bidang Non Yudisial	24 – 26 Agustus 2022
21.	JULIADI, S.Kom.	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MA RI	MA RI Bidang Non Yudisial	24 – 26 Agustus 2022
22.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Hakim Peradilan Umum	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	19 September – 21 Oktober 2022

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
23.	M. SOLEH, S.H.	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Jambi	12 – 14 Oktober 2022
24.	JULIADI, S.Kom.	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Jambi	12 – 14 Oktober 2022
25.	TEGUH HARIADI, S.Kom.	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Jambi	12 – 14 Oktober 2022
26.	FITRISIA, S.T.	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Jambi	12 – 14 Oktober 2022
27.	RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E.	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Jambi	12 – 14 Oktober 2022
28.	NANDA REZKI, S.Kom.	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Jambi	12 – 14 Oktober 2022
29.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas MA 2045	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	16 – 25 November 2022
30.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Pelatihan Persiapan Seleksi Beasiswa Pendidikan Tinggi Luar Negeri Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	21 – 25 November 2022
31.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXIV Bagi Hakim Karier dan Calon Hakim Adhoc Tipikor Tk. Pertama dan Banding	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	21 November – 10 Desember 2022
32.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan	Pengadilan Tinggi Jambi	30 November – 02 Desember 2022
33.	OLGA ULINA S., S.E.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan	Pengadilan Tinggi Jambi	30 November – 02 Desember 2022

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

Nilai pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sarolangun di awal Tahun Anggaran 2022 adalah Rp4.508.848.000,- (*Empat milyar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), kemudian ada pengurangan pagu Belanja Pegawai senilai Rp502.525.000,- (*Lima ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan pengurangan pagu Belanja Barang senilai Rp20.520.000,- (*Dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), sehingga nilai pagu DIPA 01 di akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp3.985.803.000,- (*Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Anggaran DIPA 01

No.	Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	2.669.900.000	2.659.652.235	10.247.765	99,62
2.	Belanja Barang	1.292.403.000	1.263.721.901	28.681.099	97,78
3.	Belanja Modal	23.500.000	22.538.860	961.140	95,91
JUMLAH		3.985.803.000	3.945.912.996	39.890.004	99,00

a. Belanja Pegawai DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2022 adalah Rp3.172.425.000,- (*Tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan mendapat pengurangan pagu sehingga nilainya menjadi Rp2.669.900.000,- (*Dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Secara rinci realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Rincian Belanja Pegawai

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.042.150.000	1.041.396.200	753.800	99,93
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000	19.443	2.557	88,38
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	47.210.000	47.115.770	94.230	99,80
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15.050.000	15.000.112	49.888	99,67
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	100
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.151.270.000	1.151.270.000	0	100
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	100.240.000	96.601.200	3.638.8000	96,37
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	52.000.000	51.997.560	2.440	100
511129	Belanja Uang Makan PNS	214.738.000	209.402.000	5.336.000	97,52
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	19.080.000	18.709.950	370.050	98,06
JUMLAH		2.669.900.000	2.659.652.235	10.247.765	99,62

b. Belanja Barang DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.312.923.000,- (*Satu milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), dan mendapat tambahan pagu sehingga nilainya menjadi Rp1.292.403.000,- (*Satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah*).

Secara rinci realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Rincian Belanja Barang DIPA 01

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	472.129.000	471.142.176	986.824	99,79
B	Langganan Daya dan Jasa	273.964.000	270.484.179	3.479.821	98,73
C	Pemeliharaan Kantor	372.026.000	357.252.395	14.773.605	96,03
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	54.123.000	54.110.400	12.600	99,98
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	51.840.000	51.840.000	0	100
F	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	5.280.000	5.200.000	80.000	98,48
G	Rapat Koordinasi Internal	5.400.000	5.321.000	79.000	98,54
H	Koordinasi ke Pusat/Tingkat Banding	36.310.000	29.568.800	6.741.200	81,43
I	Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB/ KPKNL	8.830.000	6.976.000	1.854.000	79,00
J	Penanganan Covid-19	7.501.000	7.491.951	9.049	99,88
A	Penanganan Covid-19 Non Ops	5.000.000	4.335.000	665.000	86,67
JUMLAH		1.292.403.000	1.263.721.901	28.681.099	97,78

c. Belanja Modal DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Modal Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp23.500.000,- (*Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Belanja Modal

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	23.500.000	22.538.860	961.140	95,91

2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

Nilai pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2022 adalah Rp110.500.000,- (*Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), dan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Anggaran DIPA 03

Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Barang	110.500.000	109.757.160	742.840	99,33

Sementara untuk rincian realisasi Belanja Barang DIPA 03 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Rincian Belanja Barang DIPA 03

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.320.000	180.000	88,00
051	Pendaftaran Berkas Perkara	56.910.000	56.886.000	24.000	99,96
052	Penetapan Hari Sidang	5.000	0	5.000	0
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	9.805.000	9.730.000	75.000	99,24
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	1.065.000	1.030.000	35.000	96,71
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	4.905.000	4.830.000	75.000	98,47
056	Minutasi/Upaya Hukum	7.600.000	7.590.000	10.000	99,87
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	2.960.000	2.749.720	210.280	92,90
058	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	1.750.000	1.621.440	128.560	92,65
051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100
JUMLAH		110.500.000	109.757.160	742.840	99,33

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2022 meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, serta sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran.

1. Rumah Dinas

Untuk pemeliharaan rumah dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2022 terdapat anggaran senilai Rp35.400.000,- (*Tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*). Sementara kondisi rumah dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3.	Rumah Dinas Hakim	3	√			Semua dalam kondisi baik
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			

2. Kendaraan Dinas

Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2022 terdapat anggaran senilai Rp59.840.000,- (*Lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*). Sementara kondisi kendaraan dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2022

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Toyota Kijang Innova	2010	√			BH 1535 S
2.	Toyota Kijang Innova	2020	√			BH 1036 S
3.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√			BH 5782 SZ
4.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√			BH 5783 SZ
5.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√			BH 5784 SZ
6.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√			BH 5785 SZ

3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Untuk pemeliharaan gedung kantor pada pagu DIPA tahun anggaran 2022 terdapat anggaran senilai Rp197.634.000,- (*Seratus sembilan puluh tujuh juta enam*

ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Sementara daftar sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2022

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
Gedung			
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
7.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
9.	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
10.	Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
11.	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
12.	Ruang Sidang	3	R. Sidang Cakra, R. Sidang Candra, R. Sidang Anak
13.	Ruang Tahanan	2	R. Tahanan Pria, R. Tahanan Wanita
14.	Ruang Mediasi	1	Tergabung dengan Ruang Diversi dan Ruang Kaukus
15.	Ruang Arsip	1	
16.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
17.	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	
18.	Ruang Posbakum	1	
19.	Ruang Perpustakaan	1	
20.	Ruang Server	1	
21.	Ruang PTSP	1	
22.	Ruang <i>Command Center</i>	1	
23.	Gudang	2	
24.	Musholla	1	
25.	Toilet	7	T. Ketua, T. Wakil Ketua, T. Hakim, T. Pegawai, T. Pengunjung, T. Tahanan, T. Disabilitas
26.	Ruang Tunggu Ramah Anak Pelaku	1	
27.	Ruang Tunggu PH/Advokat	1	
28.	Ruang Tamu Terbuka	1	
29.	Ruang Laktasi	1	
Fasilitas Perkantoran			
1.	Komputer	24	Semua dalam kondisi baik
2.	Laptop	29	28 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak berat
3.	Printer	20	Semua dalam kondisi baik
4.	Proyektor	1	Kondisi baik

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
5.	PABX	1	Kondisi Rusak, tidak dapat digunakan
6.	Mesin Fotocopy	1	Kondisi baik, sewa
7.	AC Split	18	Semua dalam kondisi baik
8.	AC Standing	1	Kondisi baik
9.	Faximile	2	1 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak berat
10.	Genset	1	Kondisi baik
11.	Speaker Portable	1	Kondisi baik
12.	TV LED	2	Kondisi baik
13.	UPS	9	Semua dalam kondisi baik
14.	CCTV Kamera	16	Semua dalam kondisi baik
15.	Server	2	Semua dalam kondisi baik
16.	Router	1	Kondisi baik
17.	Mesin Fingerprint	1	Kondisi baik
18.	Lemari Penyimpan	4	Semua dalam kondisi baik
19.	Lemari Besi Metal	29	Semua dalam kondisi baik
20.	Lemari Kayu	11	Semua dalam kondisi baik
21.	Filing Cabinet	7	Semua dalam kondisi baik
22.	Meja Kerja	50	Semua dalam kondisi baik
23.	Kursi Kerja	69	Semua dalam kondisi baik
24.	Meja Komputer	8	Semua dalam kondisi baik
25.	Meja PTSP	1	Kondisi baik
26.	Kursi PTSP	4	Semua dalam kondisi baik
27.	Kursi Pengunjung Sidang Besi	10	Semua dalam kondisi baik
28.	Meja Sidang/Perlengkapan Sidang	3	Semua dalam kondisi baik
29.	Meja Mediasi	1	Kondisi baik
30.	Stavol	1	Kondisi baik
31.	Audio Mixing Console	1	Kondisi baik
32.	Microphone	7	Semua dalam kondisi baik
33.	Bracket Standing Peralatan	1	Kondisi baik
34.	Sound Speaker	4	Semua dalam kondisi baik
35.	Tabung Pemadam Api	5	Semua dalam kondisi baik
36.	Brangkas	3	Semua dalam kondisi baik
37.	Buffet	1	Kondisi baik
38.	Kursi Kayu	18	Semua dalam kondisi baik
39.	Sice	1	Kondisi baik
40.	Handycam	1	Kondisi baik
41.	Rak Besi	2	Semua dalam kondisi baik
42.	Camera Conference	1	Kondisi baik

Pada tahun 2022 telah dilakukan penghapusan BMN, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1015/SEK/SK/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Peralatan Mesin dan Meubelair Pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Berdasarkan SK tersebut, daftar BMN yang disetujui untuk dihapus antara lain sebagai berikut:

Tabel 24. Daftar BMN Yang Dihapus Tahun 2022

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Notebook	3	Semua dalam kondisi rusak berat
2.	Laptop	1	Kondisi rusak berat
3.	PC Unit	9	Semua dalam kondisi rusak berat
4.	Facsimile	1	Kondisi rusak berat
5.	Sound System	1	Kondisi rusak berat
6.	Kipas Angin	6	Semua dalam kondisi rusak berat
7.	Meja Resepsionis	2	Semua dalam kondisi rusak berat
8.	Sice	3	Semua dalam kondisi rusak berat
9.	Kursi Kayu	27	Semua dalam kondisi rusak berat
10.	Kursi Besi/Metal	95	Semua dalam kondisi rusak berat
11.	Meja Kerja Kayu	14	Semua dalam kondisi rusak berat
12.	Perkakas Kantor Lainnya	4	Semua dalam kondisi rusak berat
13.	Buffet	2	Semua dalam kondisi rusak berat
14.	Rotary Filling	6	Semua dalam kondisi rusak berat
15.	Lemari Kayu	10	Semua dalam kondisi rusak berat
16.	Lemari Besi/Metal	2	Semua dalam kondisi rusak berat
17.	Mesin Ketik Manual Langewagon	2	Semua dalam kondisi rusak berat
Jumlah		188	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang didalamnya disebutkan pengertian administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing

lingkungan peradilan, sedangkan pengertian persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Didalam aplikasi e-Court tercakup layanan sebagai berikut:

- a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
- b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
- c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online); dan
- d. E-Litigation (Persidangan secara Online).

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan sosialisasi e-Court pada tanggal 22 November 2018 dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019, serta telah menerapkan e-Court sejak Desember 2018.

Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-Court pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2021	Pendaftaran Melalui E-Court	Pendaftaran Tidak Melalui E-Court
1.	Perdata Gugatan	27	27	-
2.	Perdata Permohonan	8	8	-
3.	Gugatan Sederhana	10	10	-
JUMLAH		45	45	-

Semua perkara masuk pada tahun 2022 telah didaftarkan melalui e-Court, sehingga persentase perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui e-Court pada tahun 2022 adalah 100%.

2. Implementasi SIPP

Peningkatan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung RI untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain, memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi

penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan, publik, dan media, dan mendukung transisi menuju sistem yang terkomputerisasi.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui SIPP dapat ditelusuri perjalanan perkara, mulai dari pendaftaran perkara hingga perkara putus ataupun pengajuan upaya hukum.

SIPP dibangun sebagai alat untuk mempermudah administrasi perkara di Pengadilan dan juga sebagai alat untuk monitoring dan pengawasan perkara. SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diakses oleh publik melalui internet dengan alamat situs www.sipp.pn-sarolangun.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP untuk memonitoring SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun periode Januari 2022 s.d. Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2022

Satuan Kerja	Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Kesesuaian	Total	Peringkat	
						Se-Wilayah Hukum PT Jambi	Se-Indonesia (perkara ≤ 500)
Pengadilan Negeri Sarolangun	153,57	532,28	101,92	186,88	974,65	7	72

3. Implementasi E-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT dan dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung

melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara Pidana secara elektronik melalui Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. E-Berpadu adalah integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada Aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik;
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan;
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan;
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan;
- e. Penangguhan Penahanan;
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan;
- g. Permohonan Penetapan Diversi;
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti; dan
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Sosialisasi e-Berpadu baik secara internal maupun eksternal. Sosialisasi e-Berpadu secara eksternal dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan mengundang Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Sarolangun, yang terdiri dari Kapolres Sarolangun, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kasi Pembinaan dan Pendidikan dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIB Sarolangun, serta Advokat yang bertugas di Posbakum.



Gambar 3. Sosialisasi e-Berpadu Bagi Aparat Penegak Hukum Wilayah Kabupaten Sarolangun

Diharapkan mulai Januari 2023 Aplikasi e-Berpadu sudah dapat diterapkan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan peradilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010 - 2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan Yang Agung” yang dibagi kedalam 3 (tiga) fungsi yaitu: **pengarah/pengendali** (*driver*), **sistem dan penggerak** (*system and enabler*) dan **hasil** (*result*).

Sebagai fungsi pengarah adalah area:

1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN

Fungsi sistem penggerak, berada dalam area:

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN

3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN

4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN

Sedangkan fungsi hasil dalam area:

6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU

7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (*court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Didalam Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh

personil Peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

1. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan.
2. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit diprediksi.
3. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
4. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi Pendukung antara lain:

1. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata.
2. Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan antara lain adalah belum adanya Standar Pelayanan yang Baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelolaan keuangan.
3. Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana antara lain:
 - a. Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari pinggir kota.
 - b. Gedung Pengadilan yang perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan maupun kenyamanan.
 - c. Kemampuan mengelola sarana dan prasarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
 - d. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara yang perlu terus diupayakan perbaikannya.
 - e. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.
4. Dalam hal pengelolaan teknologi informasi :
 - a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna

pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistim pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

- b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu memiliki sistem manajemen mutu. Yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun

Ruang Lingkup Implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Sarolangun, meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan

4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan dan pengaduan

Adapun Unit di Pengadilan Negeri Sarolangun yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

1. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
2. Hakim/Majelis Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Kapaniteraan, yang terdiri dari Kapaniteraan Muda Perdata, Kapaniteraan Muda Pidana dan Kapaniteraan Muda Hukum;
6. Panitera Pengganti;
7. Juru Sita pengganti; dan
8. Kesekretariatan, yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Pengadilan Negeri Sarolangun memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terakreditasi A (*Excellent*) dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu (*one integrated system*).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP antara lain bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9/397/KP.00.3/2/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor W5-U9/1031/KP.00.3/7/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Muda Perdata Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor W5-U9/1034/KP.00.3/7/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Muda Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor W5-U9/1035/KP.00.3/7/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Muda Pidana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor W5-U9/1047/KP.00.3/7/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Petugas Kesekretariatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Nomor W5-U9/1040/KP.00.3/7/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, berikut struktur PTSP pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

Tabel 27. Struktur PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur PTSP
1.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	MUHAMMAD SOLEH, S.H.	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penanggungjawab PTSP
5.	TONI SULASNO, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab PTSP
6.	JHON HENDRIANSYAH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Penanggungjawab PTSP
7.	TEGUH HARIADI, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penanggungjawab PTSP
8.	FITRISIA, S.T.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggungjawab PTSP
9.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab PTSP
10.	SWANDI HUTABARAT, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/ Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
11.	SUSI MEIDIYANA	PPNPN/ Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
12.	WILLIAM EDWARD SIBARANI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
13.	YULI KURNIATI, A.Md.	Pengelola Perkara/Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
14.	ANDY ILHAMSYAH, A.Md.	Pengelola Perkara/Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
15.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
16.	VERREN TRINANDES, A.Md., A.B.	Arsiparis Pelaksana/Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Subbagian Umum dan Keuangan
17.	HARFA LIANNA	PPNPN/Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Subbagian Umum dan Keuangan
18.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Hakim	Pengawas PTSP



Gambar 4. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sarolangun telah membuat beberapa inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, antara lain:

1. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPELIK)

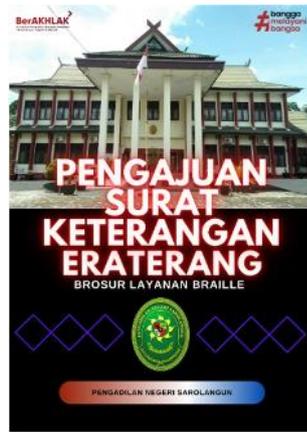
Aplikasi SIPELIK adalah aplikasi inovasi berbasis *Appsheet* yang digunakan untuk memudahkan para pencari keadilan khususnya kelompok rentan dalam mengajukan permohonan informasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Aplikasi dapat diakses melalui *smartphone* ataupun komputer melalui link <https://bit.ly/SIPELIK> atau dengan mengakses *barcode* Aplikasi SIPELIK di website Pengadilan Negeri Sarolangun www.pn-sarolangun.go.id.



Gambar 5. Aplikasi SIPELIK

2. Brosur Layanan Informasi Braille

Pengadilan Negeri Sarolangun menyediakan brosur informasi hukum dalam versi *braille*, yang bisa didapatkan pada PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun.



Gambar 6. Brosur Layanan Braille

3. Manual Book Bahasa Isyarat

Pengadilan Negeri Sarolangun menyediakan *Manual Book* Dasar-dasar Bahasa Isyarat, yang bisa didapatkan pada PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun.



Gambar 7. Manual Book *Dasar-Dasar Bahasa Isyarat*

4. Kartu Layanan Prioritas

PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun menyediakan pelayanan tanpa antrian dengan menggunakan Kartu Layanan Prioritas. Masyarakat pencari keadilan dengan disabilitas yang datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun dapat menghubungi Petugas PTSP untuk mendapatkan kartu ini.



Gambar 8. Kartu Layanan Prioritas

5. Layanan Informasi Digital Bantuan Hukum (Lidibakum)

Lidibakum merupakan Aplikasi Android Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang bertujuan memudahkan penerima layanan untuk mendapatkan informasi seputar Layanan Pos Bantuan Hukum dan melakukan konsultasi hukum melalui aplikasi.



Gambar 9. Layanan Informasi Digital Bantuan Hukum

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara yang dimaksud dengan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Pengadilan Negeri Sarolangun selaku *voorpost* Mahkamah Agung, melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun yaitu Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W5-U9/2274/KP.00.3/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun, guna melakukan pengawasan pada bidang-bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Adapun Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah :

1. Bidang Teknis

- ✔ Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara;
- ✔ Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara;

- ✔ Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara;
- ✔ Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara;
- ✔ Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara;
- ✔ Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- ✔ Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- ✔ Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1994 tanggal 24 Januari 1994;
- ✔ Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2. Bidang Administrasi

- ✔ Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- ✔ Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Tabel 28. Susunan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
1.	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Pidana
3.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Perdata
4.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Hukum
6.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
7.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

B. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari monitoring dan evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
- ✔ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- ✔ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik;
- ✔ Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi aplikasi SIPP, PTSP, E-Court, E-Berpadu dan Direktori Putusan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :

- ✔ Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- ✔ Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

